

IMPLIKASI GCG DAN BUDAYA LOKAL BALI TERHADAP KINERJA LPD

I Gusti Agung Ayu Emas Tri Buana Wati ¹

Ni Nyoman Ayu Suryandari ²

Gede Bagus Brahma Putra ³

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar)

²a.suryandari@ymail.com

Abstract

GCG is a relationship between interested parties in a regulated and organized business. The application of GCG principles in managing LPD performance is very important because it will directly provide clear direction for the LPD to improve decision making responsibly and enables better management of LPD. Based on the application of LPD performance in the local culture (Tri Hita Karana concept) is very helpful because in its implementation it has the goal of achieving good LPD performance, then we need a guideline with the concept of local wisdom, which basically teaches tri hita karana it suppresses relationship in life in this world. This study aims to examine the effect of applying GCG principles and implementation of local culture on LPD performance in Abiansema District. The sample in this study is all LPD in Abiansema District with a total population and a sample of 34 LPD. Each LPD was taken by 2 respondents so that there were 68 respondents. This study uses the nonprobability sampling method with saturated sampling technique. Data collection using a questionnaire. Data analysis techniques are multiple linear regression analysis techniques. Hypothesis testing results show that transparency, accountability, responsibility, and independence do not affect the performance of LPD in the Abiansema District, while the principles of fairness and implementation of local culture has a positive effect on LPD performance in the Abiansema District.

Keywords : GCG, local culture, LPD.

I. PENDAHULUAN

LPD yang merupakan Lembaga keuangan desa wajib dilestarikan, ditingkatkan dan dibina karena memberi kegunaan bagi krama desa dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena LPD berada di masing-masing desa maka kepemilikannya didominasi oleh para masyarakat desa (krama desa). LPD diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan, karena LPD menciptakan lapangan kerja bagi krama desa, mengurangi angka rentenir dan melancarkan lalu lintas pembayaran (Suartana, 2009). Suryantara (2018) menegaskan jika LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Karena pemisahan tersebut memunculkan asimetri informasi.

Konflik kepentingan (antara pemilik dana/ krama desa dan pengelola) dapat dikurangi dengan menerapkan GCG

karena semakin tingginya kepercayaan krama desa, mengurangi asimetri informasi, mengurangi kesalahan pengambilan keputusan dan selalu mempertahankan hak *stakeholder*, dengan demikian akan mampu untuk meningkatkan kinerja LPD (Shanikat dan Abdi, 2011). Prinsip-prinsip GCG berupa transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.

Hal lain yang tidak kalah penting dari GCG adalah konsep kearifan lokal terutama di Bali yang kental dengan budaya Tri Hita Karana. Menurut Suryantara (2018) budaya lokal (THK) bermakna dalam mengelola LPD karena konsep ini merupakan falsafah hidup yang untuk dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi, dengan menekankan 3 hubungan manusia diantaranya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan

alam/lingkungan. Bawa, dkk (2017) mengatakan bahwa etnik Bali sangat membanggakan diri atas kearifan lokalnya, yaitu THK. THK adalah filsafat atau pandangan hidup manusia karena manusia mampu mengembangkan harmoni sosial (Pawongan), harmoni ekologis (Palemahan), dan harmoni teologis (Parhyangan). Unsur keseimbangan harus menjadi pedoman hidup agar dapat menghargai lingkungan sekitar agar tercipta kehidupan yang tentram dan damai. Budaya lokal THK akan mengurangi sifat individualism manusia sehingga pertikaian yang dihadapi akan mampu dikurangi. Konsep Tri Hita Karana sangat membantu karena dalam penerapannya mempunyai tujuan agar tercapainya kinerja LPD yang baik, maka diperlukan pedoman yang berkonsep kearifan lokal, dimana ajaran THK menekan pada hubungan yang baik dalam kehidupan. Dengan menerapkan ajaran tersebut diharapkan mampu memberikan kinerja keuangan yang lebih (Suryantara, 2018).

Kabupaten Badung memiliki jumlah LPD sebanyak 122 pada 6 kecamatan. Usaha control yang dilakukan terhadap LPD ini adalah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk semua LPD. Dari 122 LPD di Kabupaten Badung, masih terdapat kondisi LPD yang tidak sehat yaitu kondisi LPD cukup sehat sebanyak 22 LPD, kondisi LPD kurang sehat sebanyak 9 LPD, kondisi LPD tidak sehat sebanyak 4 LPD dan kondisi bangkrut sebanyak 4 LPD. Hal ini disampaikan oleh Bapak I Nyoman Parta dalam rapat Paripurna DPRD Bali Tahun 2017 (Kabar-Nusa, 2017). Permasalahan banyak terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Badung seperti kasus LPD Kapal yang telah memanipulasi data tabungan fiktif dalam sistem keuangan LPD sehingga mencapai kerugian sebesar Rp. 15 Miliar (Tribun-Bali, 23 Oktober 2018), kasus lainnya juga terjadi di Kecamatan Abiansemal, kasus yang pernah terjadi yaitu di LPD Kekeran, dimana pegawai kolektor di LPD Kekeran ini melakukan kegiatan penggelapan dana LPD sehingga ditemukan kerugian sebesar 5,3 Miliar dimana kasus ini sudah terjadi semenjak tahun 2017 lalu, dan Bendesa Adat Kekeran segera melakukan perbaikan terhadap LPD dalam kasus ini (Radar-

Bali, 18 Februari 2019). Kasus lainnya juga terjadi di LPD Ambengan dimana diduga pengurus di LPD Ambengan telah melakukan penyimpangan, sehingga Pemkab Badung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini (Tribun-Bali, 5 Maret 2019).

Kecamatan Abiansemal berada di Kabupaten Badung Utara yang juga merupakan daerah penyangga aspek sosial dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2018) menegaskan kembali jika LPD di Kecamatan Abiansemal pada tahun 2015-2017 berjumlah 34 LPD yang termuat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kesehatan LPD Kecamatan Abiansemal

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
1. Sehat	30	30	30
2. Cukup sehat	3	1	6
3. Kurang sehat	1	2	1
4. Tidak sehat	0	1	2

Sumber : LPLPD Kabupaten Badung (2018)

Bertambahnya jumlah LPD di kecamatan Abiansemal tidak dibarengi dengan bertambahnya kualitas LPD, tercermin dari semakin bertambahnya jumlah LPD yang kurang sehat yaitu sejumlah 4 LPD di tahun 2015 dan 2016 namun menjadi 9 LPD di tahun 2017. Hal ini menunjukkan pentingnya diterapkan *Good corporate governance* dan Tri Hita Karana dalam LPD.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Teori ini bertujuan untuk mengurangi *agency cost* dari pihak-pihak yang melakukan kontrak perjanjian karena adanya ketidakpastian yang mereka temui. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keyakinan para krama desa adat beserta nasabah bahwa investasi yang mereka lakukan tidak akan mengalamikerugian (Suryantara, 2018). Para krama desa adat dan nasabah yakin bahwa dana yang telah mereka investasikan tidak akan dicuri atau digelapkan oleh pengelola LPD dan tidak akan diinvestasikan pada proyek-proyek diluar kesepakatan, karena adanya mekanisme control dalam pengelolaan LPD. Sehingga GCG bias menurunkan *agency cost* (Jayanti, 2015).

2.2. Transparansi terhadap Kinerja LPD

Transparansi artinya bahwa perusahaan dalam memberikan informasi kepada *stakeholder* bersifat terbuka dan jujur (Hapsari, 2018). Kepercayaan *stakeholder* akan semakin meningkat jika perusahaan meningkatkan keterbukaan dan pengungkapan informasi kepada *stakeholder*. LPD yang transparan akan menumbuhkan kepercayaan dari krama desa atau nasabah sehingga mereka mempercayakan dana mereka di LPD. Hal ini senada dengan hasil riset Bulandari (2014) serta Suwarmika, dkk (2019).

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD

2.3. Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* sehingga perusahaan harus bekerja dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Sari, 2017). Peningkatan kinerja LPD akan meningkat jika LPD terdapat kejelasan terkait fungsi, struktur, sistem, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara wajar. Hal ini senada dengan hasil riset Sandraningsih (2015).

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD

2.4. Responsibilitas terhadap Kinerja LPD

Responsibilitas artinya pengelolaan perusahaan yang operasionalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan GCG perusahaan selain mematuhi peraturan yang ada, perusahaan juga harus melaksanakan tanggungjawab *stakeholders* (Sari, 2017). LPD yang telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan kebijakan maupun peraturan yang berlaku akan meningkatkan kinerja LPD. Hal ini senada dengan hasil riset Bulandari (2014).

H3 : Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD

2.5. Independensi terhadap Kinerja LPD

Keputusan yang diambil oleh LPD harus bersifat independent yaitu tidak terikat oleh pihak manapun (Sari,

2017). Perusahaan harus bersikap objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan sehingga meningkatkan kinerja LPD. Pengambilan keputusan LPD yang tidak didasarkan pada kepentingan tertentu akan menghasilkan keputusan yang baik sehingga akan meningkatkan kinerja LPD. Hal ini senada dengan hasil riset Setyawan (2013).

H4 : Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD

2.6. Kewajaran terhadap Kinerja LPD

Bukhori (2012) menyatakan bahwa perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Hal ini karena adanya perjanjian dan perundang-undangan maka perusahaan berkewajiban memenuhi kepentingan *stakeholder* (Sari, 2017). Dengan adanya kesetaraan untuk semua *stakeholder* akan menjauhkan konflik sehingga kinerja LPD akan meningkat. Hal ini senada dengan hasil riset Bulandari (2014).

H5 : Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD

2.7. Pengaruh Implementasi Budaya Lokal terhadap Kinerja LPD

Bawa, dkk (2017) mengatakan bahwa etnik Bali sangat membanggakan diri atas kearifan lokalnya, yaitu Tri Hita Karana (THK). THK adalah filsafat atau pandangan hidup manusia karena manusia mampu mengembangkan harmoni sosial (Pawongan), harmoni ekologis (Palemahan), dan harmoni teologis (Parhyangan). Ditengah globalisasi dan homogenisasi perlunya konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan yang menekan tiga hubungan manusia yaitu kepada sesama manusia, kepada alam sekitar dan dengan Tuhan.

Nilai yang terdapat pada Tri Hita Karana dapat sebagai pedoman dalam pembentukan sikap mental dan perilaku SDM sehingga LPD semakin bertumbuh dan kinerja keuangan semakin baik (Suryantara, 2018). Hal ini senada dengan hasil riset Suryantara (2018).

H6 : Implementasi budaya lokal berpengaruh positif terhadap kinerja LPD

III. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Independen

- 1) *Good Corporate Governance*
 - a) Transparansi (Tr) adalah sikap keterbukaan pengurus LPD dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga tersebut.
 - b) Akuntabilitas (Ak) adalah kewajaran pengelola LPD dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.
 - c) Responsibilitas (Re) adalah pengelola LPD mematuhi dan melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat.
 - d) Independensi (In) adalah pengelola LPD dalam mengambil keputusan bebas dari intimidasi dari pihak lain sehingga terhindar dari pihak yang merugikan.
 - e) Kewajaran (Ke) adalah keadilan dan kesetaraan untuk semua kalangan (krama desa, pemerintah dan pengelola) sesuai undang-undang yang berlaku.
- 2) Budaya Lokal (Thk)
 - a) Parhyangan, hubungan manusia dengan Tuhan dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - b) Pawongan, hubungan sesama umat manusia untuk berkomunikasi dan berhubungan harmonis.
 - c) Palemahan, hubungan manusia dengan lingkungannya dalam mewujudkan keharmonisan alam.

3.1.2 Variabel Dependen

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa merupakan variabel dependen dengan indikator menggunakan *balance scorecard* yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif bisnis internal. Instrument mengadopsi instrument yang digunakan oleh Auliasari (2008).

3.2 Penentuan Sampel

Populasi yang diteliti yaitu seluruh LPD yang berada di Kecamatan Abiansema yang berjumlah 34 LPD. Jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 34 LPD, dimana tiap LPD diambil 2 responden sehingga berjumlah 68 responden yang terdiri dari 34 ketua dan 34 badan pengawas. Metode

penentuan sampel dengan *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Data penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrument yang dipakai dalam penelitian ini sudah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan dalam penelitian. Terkait hasil analisis regresi linear berganda ini, telah memenuhi asumsi secara statistic sehingga model layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil analisis dari model penelitian:

Tabel 2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Koefisien	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	14.726	3.359	.001
Tr	-0.079	-0.342	.734
Ak	0.307	1.657	.103
Re	0.145	0.770	.444
In	-0.083	-0.450	.654
Ke	0.703	2.726	.008
Bl	0.148	2.129	.037
F		5.775	
Signifikansi		0,000	
Adjusted R Square		0,300	

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien determinasi sebesar 30% yang berarti bahwa variasi naik turun persepsi terkait budaya local 30% dipengaruhi oleh mekanisme GCG. Sedangkan sisanya 70% terdapat faktor lain yang mempengaruhi di luar model penelitian. Model penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga model penelitian ini cocok dengan data yang diobservasi.

Persamaan regresi linear berganda disajikan sebagai berikut:

$$KLPD = 14,726 - 0,079Tr + 0,307Ak + 0,145Re - 0,083In + 0,703Ke + 0,148Thk$$

- 1) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja LPD
Berdasarkan Tabel 2 diperoleh koefisien regresi negatif sebesar -0,079 dengan tingkat signifikansi variabel transparansi sebesar 0,734. Hal ini berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD, sehingga tidak diterima. Adanya rasa ikut memiliki LPD oleh krama

desa menyebabkan tumbuhnya kepercayaan dari krama desa sehingga kinerja LPD akan terus terjaga. Penelitian ini senada dengan hasil riset Mahaendrayasa dan Putri (2017).

2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja LPD

Dari Tabel 2 koefisien regresi positif 0,307 pada tingkat 0,103 artinya kinerja LPD tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Krama desa yang berdasarkan pada awig-awig desa dan adanya sanksi sosial dari krama desa maka akan tetap menjaga perilakunya. Krama desa sangat mematuhi awig-awig desa tersebut dan ada rasa malu jika tidak mampu menjalankan kewajibannya sehingga kinerja LPD akan terus dapat dipertahankan. Penelitian ini senada dengan hasil riset Hapsari (2018).

3) Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja LPD

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh koefisien regresi positif 0,145 dengan tingkat 0,444. Artinya kinerja LPD tidak terbukti dipengaruhi oleh responsibilitas. Tidak berpengaruhnya responsibilitas pada kinerja LPD mungkin karena kurang jelasnya dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan LPD. LPD diatur oleh hukum adat. Jadi walaupun mereka taat pada aturan namun aturan yang digunakan sebagai pedoman yang belum jelas. Penelitian ini senada dibuktikan oleh Hapsari (2018).

4) Pengaruh Independensi terhadap Kinerja LPD

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh dari koefisien regresi negative -0,083 pada tingkat 0,654. Artinya kinerja LPD tidak ditentukan oleh independensi. LPD yang telah berlandaskan pada independensi juga belum tentu memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja LPD juga terkait dengan kredit yang disalurkan oleh LPD. Yang kita ketahui bahwa hanya krama desa saja yang dapat meminjam kredit. Sehingga karakter krama desa, jumlah krama desa dan kemampuan krama desa

dalam membayar kredit sangat menentukan, dan kemungkinan LPD untuk meningkatkan kinerja juga dibatasi oleh ruang lingkup mereka. Hal ini senada dengan hasil riset Sastra (2017).

5) Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja LPD

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh koefisien positif 0,703 pada tingkat 0,008. Artinya kewajaran dapat meningkatkan kinerja LPD. LPD harus menunjukkan kesetaraan kepada *stakeholder* untuk meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini senada dengan hasil riset Sandraningsih (2015).

6) Pengaruh Implementasi budaya lokal terhadap Kinerja LPD

Hasil menunjukkan koefisien regresi 0,148 pada tingkat 0,037. Artinya budaya lokal meningkatkan kinerja LPD. Implementasi budaya lokal dapat sebagai pedoman yang dapat membentuk sikap dan perilaku pengurus LPD. Tri hita karena mempunyai nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dalam segala aspek dan wujud kearifan lokal masyarakat Bali. Nilai yang terkandung dalam tri hita karena ini mengajarkan manusia selalu menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dan alam/ lingkungan, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD yang baik. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Suryantara (2018) yang menyatakan bahwa filosofi Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Prinsip transparansi (Tr) tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Kepercayaan yang tinggi dari krama desa menyebabkan kinerja LPD akan terus terjaga.
- 2) Prinsip akuntabilitas (Ak) tidak terbukti sebagai penentu kinerja LPD. Ada rasa malu atau sanksi

sosial dari krama desa jika tidak mampu menjalankan kewajibannya sehingga kinerja LPD akan terus dapat dipertahankan.

- 3) Prinsip tanggung jawab (Re) tidak terbukti sebagai penentu kinerja LPD. Tidak berpengaruhnya tanggung jawab pada kinerja LPD mungkin karena kekurangjelasan dasar hukum sebagai pedoman pengelolaan LPD.
- 4) Prinsip independensi (In) tidak terbukti sebagai penentu kinerja LPD. Banyaknya keterbatasan yang dialami oleh LPD untuk mengembangkan diri walaupun sejatinya LPD telah bekerja secara independent.
- 5) Prinsip kewajaran (Ke) dapat meningkatkan kinerja LPD. Hasil ini menunjukkan LPD di Kecamatan Abiansemal melakukan kesetaraan kepada *stakeholder*.
- 6) Implementasi budaya lokal (Thk) dapat meningkatkan kinerja LPD. LPD di Kecamatan Abiansemal sudah mengimplementasikan tri hita karena yang dapat sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku pengurus LPD. Terjaganya keselarasan hubungan dapat meningkatkan kinerja LPD.

5.2 Saran

- 1) Bagi LPD disarankan untuk meningkatkan prinsip kewajaran dan mengimplementasikan budaya lokal.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan faktor-faktor lain seperti corporate social responsibility (CSR), manajemen risiko, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja LPD

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Bawa, Tunjuga, dan Maryati. 2017. *Agama Hindu, Pancasila, Dan Kearifan Lokal Pondasi Pendidikan Karakter*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Bukhori, I., dan Raharja, R. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI 2010)*. *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Bulandari, I. G. A. W., dan Damayanthi, I. G. A. E. 2014. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 8 No 3 pp.641-659
- Dewi K, dan Putri. 2014. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*, Vol 8 No 1, pp 70-82
- Ghozali, H Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Ni Made Madani, dan I. Dewa Nyoman Wiratmaja. 2018. "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Tingkat Kesehatan LPD Pada LPD Se-Kecamatan Abiansemal." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 25 No 1, pp 54-82, <http://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p03>.
- Jensen, M.C and W.H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*, 3, 305-360
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Sandraningsih, K. B., dan Putri, A. D. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 11 No 3, pp 878-893.
- Setyawan, K. M., dan Dwija, I. G. A. M.

- A. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, Vol 5 No 3, 586-598.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bnadung: Alfabeta.
- Suryantara. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Suryani, Raka. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal Dan Petang. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Suwarmika, I. K., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. P. G. B. A. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1), 198-217.
- Wirawan, A. G. B. P., dan Dwija, I. G. A. M. A. 2018. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, Vol 23 No 3, pp.1791-1818. <http://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p07>